KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Dianggarkan Rp 1,6 Triliun: Staf Ahli Anggota DPR Masih Kental Koncoisme
Tanggal : Selasa, 17 Februari 2015
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Dianggarkan Rp 1,6 Triliun

Staf Ahli Anggota DPR Masih Kental Koncoisme

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) memperoleh penambahan anggaran Rp 1,6 triliun dalam APBN Perubahan 2015. Dana sebesar itu untuk penambahan tenaga ahli para anggota legislatif dan biaya rumas aspirasi. Penggelontoran dana besar rawan penyalahgunaan.

Koordinator LSM Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan, sampai hari ini Setjen DPR belum punya konsep jelas tentang siapa yang dimaksud dengan tenaga ahli. Sebab, kata dia, kebanyakan tenaga ahli anggota legislator saat ini adalah orang-orang yang tidak punya kompetensi. "Saya setuju kalau peruntukannya jelas. Cuma, konsep tenaga ahli ini harus diterangkan juga. Selama ini, lihat saja, tenaga ahli anggota DPR itu siapa," kata dia.

Sebastian mencatat, beberapa anggota legislator bahkan menjadikan kerabat dan para konconya sebagai tenaga ahli. Menurut dia, perlu ada aturan terang soal siapa yang dikategorikan tenaga ahli. Sebab, menurut dia, anggota parlemen di negara maju, memang menuntut adanya tenaga ahli sesuai dengan fungsi legislasi. Hanya saja, pendekatannya bukan penganggaran, melainkan kebutuhan.

Namun, berbeda di DPR RI, menurut Sebastian, kebutuhan tenaga ahli diadakan karena adanya anggaran. Namun, penggunaan anggaran untuk tenaga ahli itu pun sayangnya tak memberikan peningkatan kualitas produk legislasi dari masing-masing anggota. "Kita semua tahu bagaimana undang undang hasil kinerja DPR ini," kata dia.

Senada, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, mengatakan, mekanisme dan persyaratan perekrutan tenaga ahli, sekretaris pribadi dan ajudan anggota dewan tidak jelas.

"Anggota dewan harus mengubah kriteria atau formula staf ahli, supaya mampu meningkatkan kinerja," kata Siti Zuhro kepada *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Dia menilai, anggota dewan belum mampu membedakan antara staf ahli dengan orang kepercayaan. Jadi, Sekretariat Jenderal DPR seharusnya turun tangan melakukan pembenahan, di antaranya, ikut mengelola staf ahli. Sebab, yang dibutuhkan anggota dewan adalah staf ahli atau pakar, bukan orang kepercayaan.

"Sekjen DPR bertanggungjawab memonitor semua alat kelengkapan dan supporting staff and system di DPR, apakah efektif dan fungsional atau tidak," ujarnya.

Siti Zuhro menambahkan, dengan menerapkan standar kepakaran staff ahli, kalau ada anggota DPR menemui masalah dalam melaksanakan tugasnya, dapat berkonsultasi pada staf ahli yang menguasai ilmu. Sebab, yang dibutuhkan dari staf ahli adalah pengetahuan pada persoalan yang mendukung kinerja anggota dewan.

Sementara itu, Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Irma Suryani Chaniago memaparkan peruntukan dana Rp 1,6 triliun tersebut. Sebanyak Rp 600 miliar dikelola Sekretariat Jenderal DPR, sementara Rp 1 triliun untuk gaji tenaga ahli serta operasional rumah aspirasi selama tahun 2015.

Menurutnya, saat ini, rata-rata anggota dewan memiliki dua tenaga ahli dan satu staf administrasi yang berkantor di Kompleks Parlemen Senayan. Sedangkan BURT berencana menempatkan tenaga ahli tambahan di daerah pemilihan.

"Rumah aspirasi penting, agar konstituen mudah menyampaikan aspirasi," kata Irma.

Sebanyak Rp 1 triliun akan digunakan untuk gaji 2 tenaga ahli bagi 560 anggota dewan. Satu orang tenaga ahli mendapat gaji Rp 7,5 juta per bulan. Sisanya untuk membiayai rumah aspirasi dan operasionalnya. "Termasuk fasilitas rumah aspirasi, komputer satu set, meja kursi furniture satu set," ucap politikus Partai Nasdem itu. ■ QAR